

## ACTOR RELATIONS IN DETERMINING EDUCATION CITY AREA POLICIES IN MAJENE REGENCY

Relasi Aktor Dalam Penetapan Kebijakan Kawasan Kota Pendidikan Di Kabupaten Majene

Nurfadilah<sup>1\*</sup>, Andi Yakub<sup>2</sup>, Sakinah Nadir<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Universitas Hasanuddin

[Nurfadhilahahmad0603@gmail.com](mailto:Nurfadhilahahmad0603@gmail.com)

(\*) Corresponding Author

[Nurfadhilahahmad0603@gmail.com](mailto:Nurfadhilahahmad0603@gmail.com)

**How to Cite:** Nurfadilah. (2024). Relasi Aktor Dalam Penetapan Kebijakan Kawasan Kota Pendidikan Di Kabupaten Majene doi: [10.36526/js.v3i2.4140](https://doi.org/10.36526/js.v3i2.4140)

Received : 12-10-2024  
Revised : 11-11-2024  
Accepted : 30-11-2024

### Keywords:

Actor relations, policy determination, Education City, Majene Regency.

### Abstract

The phenomenon of West Sulawesi's expansion from South Sulawesi has become a space for actors to mobilize interests in determining the central positions of their region. The study examines actor relations in determining the centre of education services in Majene Regency involving actors with various interests. Policy determination lies in the central position of the various political actors themselves, where actors interact with each other. This Research aims to find out why Majene is designated as the education service centre of West Sulawesi and how the interaction pattern between actors. The research method uses descriptive qualitative analysis. The data required in this research consists of primary data and secondary data. The results showed that the background of Majene's establishment as an education service centre was due to its failure to become the capital of West Sulawesi Province. Then looking at the historical reality, Majene is known to have a strong educational tradition during the colonial period. The acceptance of Majene as the centre of education service is not only based on the demands of Majene, but also the support of West Sulawesi expansion figures. Second, the pattern of interaction between actors, 1) interaction between Majene dan Informal local government, 2) interaction between Majene local government and the definitive Governor of West Sulawesi.

## PENDAHULUAN

Menurut Marsh & Stoker studi kebijakan seyogyanya bersandar pada formal yang memiliki kekuasaan dan kewenangan terlegitimasi dengan melalui prosedur *legal formal* yang penetapannya berdasar pada perundang-undangan. Disisi lain aktor formal memiliki kekuasaan administratif dalam mensubordinasi pihak lain. Dari perspektif tersebut menunjukkan bahwa arah kekuasaan tetap berada pada kuasa aktor formal (Yebi Ma'asan Mayruddin, dkk 2020:2).

Namun, jika ditinjau dari studi-studi kebijakan yang dikemukakan oleh Helmke and Levitsky, menunjukkan bahwa aktor informal mempunyai peran dalam mempengaruhi proses kebijakan. Aktor formal adalah seperangkat aturan yang tersusun jelas dalam struktur pemerintahan. Sedangkan aktor informal aturan sosial yang tidak tertulis didiskusikan diluar ranah formal, namun hal tersebut justru memberi pengaruh besar pada keputusan politik (Fadli Afriadi 2021). Aktor kebijakan formal dan informal melakukan interaksi diluar dari ranah formal yang memiliki tujuan yang sama. Ketika aktor formal tidak bisa melakukan perannya secara maksimal, maka sebagian peran akan diambil alih oleh aktor informal. Semakin besar hak yang diberikan kepada aktor informal akan semakin banyak memainkan perannya.

Studi kebijakan semakin penting dan menarik jika dikaitkan dengan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut diharapkan akan memberi kesejahteraan kepada sebagian besar masyarakat, namun dibalik harapan tersebut juga diliputi kekhawatiran, otonomi daerah di

cemaskan hanya akan melahirkan raja-raja kecil tanpa memperdulikan kesejahteraan rakyat. Salah satu yang menjadi isu penting terkait dengan otonomi daerah adalah pemekaran wilayah. Pada dasarnya pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah sebagai upaya membuka peluang-peluang baru untuk pemberdayaan masyarakat.

Namun di sisi lain, berbagai masalah muncul sehubungan dengan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah tidak serta merta diikuti dengan terjadinya perubahan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, pemekaran wilayah justru menimbulkan implikasi konflik dan kepentingan antar daerah. Proses pemekaran dan menjadikan daerah otonom baru menimbulkan beberapa masalah terkait pemetaan posisi-posisi sentral dalam wilayah administrasi.

Menarik untuk diperhatikan wacana yang berkembang terkait dengan keinginan Sulawesi Barat berpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan. Argumen paling menonjol adalah tentang dimensi kesenjangan wilayah. Sejak berhembusnya wacana keinginan Sulawesi Barat berpisah dari Sulawesi Selatan berbagai macam polemik terjadi. Pemekaran ini memunculkan perpecahan antar daerah terkait perebutan beberapa posisi. Misalnya, wacana penentuan Ibukota Provinsi Sulawesi Barat sempat menuai kecaman dari berbagai pihak karena adanya statemen dari delegasi Mamuju yang menginginkan ibukota

Polemik tentang daerah mana yang layak untuk di jadikan sebagai ibukota kian menghangat ketika DPRD Majene dan Polmas ikut memberikan komentar yang menekankan bahwa daerahnya juga layak sebagai ibukota provinsi dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Disisi lain Mamuju mendukung pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan syarat Mamuju menjadi Ibu Kota provinsi, jika tidak Mamuju akan menarik dukungannya dari rencana pembentukan Sulawesi Barat. Untuk mempertahankan pemekaran Sulawesi Barat Polmas dan Majene kemudian menyetujui Mamuju sebagai Ibu Kota Provinsi (Hanapi Faisal ,2023)

Setelah beberapa kabupaten yang masuk dalam wilayah Sulawesi Barat menyetujui Mamuju sebagai Ibu Kota Provinsi, untuk menghindari kesenjangan antar daerah kemudian Majene di tetapkan sebagai pusat pelayanan pendidikan, Polewali Mamasa ditetapkan sebagai kepala pemerintahan (Gubernur akan selalu berasal dari Polmas). Kemudian dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Polewali Mandar sebagai kota percepatan ekonomi dan Mamasa sebagai kota Wisata. Tulisan ini berfokus pada proses penetapan Majene sebagai pusat pelayanan pendidikan dan pola interaksi antar aktor pemekaran Sulawesi Barat dalam penetapannya.

Kabupaten Majene sebagai ikon pendidikan Sulawesi Barat melalui proses tarik ulur politik. Beragam konflik terjadi antar aktor politik lokal dalam mengawal masing-masing kepentingannya. Meskipun di awal wacana pemekaran Sulawesi Barat, Majene menjadi kandidat terkuat dan mendapat legitimasi dari pejuang pemekaran. Hal tersebut cukup berdasar melihat Majene merupakan Ibukota Afdeling Mandar, namun diujung perjuangan justru menuai kekecewaan dengan penetapan Mamuju sebagai ibukota provinsi dan Majene segaia pusat pelayanan pendidikan.

Proses penetapan kebijakan tidak akan terlepas dari proses politik. Berbagai isu dan permasalahan yang terjadi kemudian saling diperebutkan untuk dijadikan alat oleh aktor-aktor politik yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Masing-masing dari mereka akan beradu argumen berusaha mengangkat masalah yang dianggap penting untuk mendapatkan legitimasi. Dengan kata lain dalam proses penetapan kebijakan, akan selalu ada yang lebih dominan dan memiliki kemampuan (kekuasaan) yang lebih dibandingkan dengan aktor lain. Disinilah peranan politik begitu kuat, dimana akan ada proses tawar-menawar atau *deal* tertentu antara para aktor.

Berhasil atau tidaknya suatu masalah yang diangkat bergantung pada kemampuan tawar-menawar (*bargaining power*) dan mengelola sumber daya yang dimiliki oleh aktor tersebut. Dalam konteks Kabupaten Majene sebagai pusat pelayanan pendidikan, menarik untuk melihat mengapa

Majene ditetapkan sebagai pusat pelayanan pendidikan, lalu bagaimana interaksi aktor-aktor yang terlibat sehingga kebijakan ini lahir.

## METODOLOGI PENELITIAN.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih (Atherton dan Klemmack 2011:35). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang terlibat langsung dalam proses penetapan Majene sebagai pusat pelayanan pendidikan. Kemudian didukung dengan studi kepustakaan sebagai data sekunder dikumpulkan merujuk pada artikel, jurnal dan buku.

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Haberman terdiri dari tiga langkah (Muhammad Idrus 2009:148). Pertama, reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kedua, setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Ketiga, Penarikan kesimpulan dasar dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung, baru kemudian dilakukan reduksi dan penyajian data (Muhammad Idrus 2009:151-152).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Latar Belakang Penetapan Majene Sebagai Pusat Pelayanan Pendidikan

Pada proses pemekaran Provinsi Sulawesi Barat dari Sulawesi Selatan menimbulkan konflik antar daerah, berawal dari adanya gagasan dari Kabupaten Mamuju yang menginginkan posisi sebagai Ibukota provinsi Sulawesi Barat. Permintaan tersebut menyita perhatian dari kabupaten Majene dan Polmas yang sama-sama mengklaim kepantasan daerahnya menjadi Ibukota Provinsi. Dalam rangka membendung konflik Komite Aksi Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (KAPP-Sulbar) mengadakan kongres besar rakyat Mandar di laksanakan pada tanggal 19 sampai 21 Januari 2001 di Gedung Assamalewuang di Kabupaten Majene. Permintaan Mamuju sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat sudah tak terbendung lagi, disamping itu kegigihan pejuang pemekaran Sulawesi barat dalam memekarkan provinsi ini sangat besar. Untuk mendapatkan dukungan dan surat rekomendasi dari Kabupaten Mamuju, akhirnya menyetujui Mamuju sebagai Ibukota Provinsi yang mana pada saat itu membutuhkan sekurang-kurangnya tiga kabupaten tergabung sebagai syarat pembentukan provinsi.

Pasca keputusan tersebut di setujui, gerakan menolak Mamuju sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat oleh kelompok Forum Kota Tua memandang bahwa Kabupaten Majene jauh lebih layak menempati posisi strategis tersebut, tidak serta merta menempatkan kota tua ini memperoleh posisi yang diharapkan. Faktanya, Kabupaten Majene justru ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. Ungkapan kekecewaan di ekspresikan melalui aksi protes kepada Rahmat Hasanuddin selaku ketua KAPP-Sulbar. Kekecewaan Majene setelah penetapan Mamuju sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat disebabkan oleh beberapa faktor historis dan sosial. Kabupaten Majene memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam perkembangan budaya dan pemerintahan di wilayah ini, sehingga Majene memiliki legitimasi kuat sebagai pusat pemerintahan. Kekecewaan Majene atas penetapan Mamuju sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat adalah bagian dari dinamika sosial-politik yang lebih dalam di wilayah tersebut, yang mencerminkan sejumlah faktor historis, politik, ekonomi dan budaya.

Kekecewaan muncul karena penetapan Mamuju sebagai Ibukota Provinsi dipandang mengesampingkan sejarah panjang Majene. Bagi sebagian warga, status Ibukota Provinsi adalah simbol pengakuan atas warisan sejarah dan identitas budaya. Majene menganggap layak

mendapatkan posisi tersebut, bukan hanya faktor geografis, tetapi untuk menghormati kontribusi historis dan budayanya. Dengan penetapan Mamuju sebagai Ibukota sering kali menerima prioritas pembangunan dan tentu mendapatkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat dan provinsi. Selain faktor sejarah dan ekonomi, penetapan Mamuju sebagai Ibukota juga dapat dilihat dari kacamata politik. Menganggap bahwa keputusan tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan politik dari pada pertimbangan geografis atau historis. Meskipun Ibukota provinsi berapa di Mamuju, Majene masih bisa memainkan peran penting dalam pertumbuhan Sulawesi Barat pada sektor Pendidikan.

Kegigihan Komite Aksi Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (KAPP Sulbar) dalam memperjuangkan pemekaran Sulawesi Barat menjadi provinsi baru adalah kisah perjuangan panjang yang melibatkan berbagai upaya politik, sosial, dan diplomasi. Salah satu langkah pertama KAPP-Sulbar adalah mengkonsolidasikan kekuatan masyarakat mandar seperti mendapatkan dukungan dari berbagai etnis, organisasi dan pemerintah daerah. Perjuangan KAPP-Sulbar tidak hanya terbatas pada tingkat lokal, namun melancarkan lobi politik di tingkat nasional untuk mendukung pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Perjuangan KAPP-Sulbar tentunya melalui proses yang panjang dan tidak mudah, dengan menyatukan pandangan elit politik lokal yang berbeda, selain itu melakukan lobi politik ke pusat agar mendapatkan legitimasi.

Kabupaten Majene, pada awalnya dipertimbangkan sebagai calon Ibukota Provinsi Sulawesi Barat, secara ikhlas (legowo) memberikan posisi tersebut kepada Mamuju. Meskipun Majene memiliki sejarah dan pengaruh budaya yang kuat sebagai pusat wilayah Mandar pada masa Afdeling Mandar, keputusan ini diambil demi kepentingan bersama dan untuk menjaga stabilitas serta persatuan di Sulawesi Barat. Kabupaten Majene menunjukkan sikap legowo (ikhlas) demi menjaga persatuan di Sulawesi Barat. Menyadari bahwa persaingan dalam penentuan Ibukota bisa menciptakan perpecahan, dan lebih memilih untuk mendukung keputusan yang dianggap terbaik untuk kemajuan provinsi secara keseluruhan.

Kabupaten Majene dengan sikap legowonya, berupaya menghindari konflik yang berkepanjangan yang dapat mengganggu proses pembentukan provinsi Sulawesi Barat. Kelegaan dan kerelaan Majene untuk memberikan peran Ibukota kepada Mamuju menunjukkan semangat kebersamaan dan komitmen untuk memajukan seluruh wilayah Sulawesi Barat, tanpa mengedepankan kepentingan satu daerah diatas yang lain. Keputusan ini menunjukkan mendukung kepentingan jangka panjang Sulawesi Barat, dengan harapan bahwa seluruh daerah di Provinsi ini bisa berkembang bersama secara adil dan merata. Tokoh-tokoh penting dari Majene dan Polmas sepakat bahwa Mamuju dengan segala kelebihanannya ditetapkan sebagai Ibukota. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Majene dan Polmas menunjukkan sikap yang bijaksana dalam menerima keputusan ini, demi kepentingan yang lebih besar.

Setelah batal menjadi Ibukota provinsi Sulawesi Barat, Majene berupaya untuk tetap berperan penting dalam pembangunan daerah dengan meminta posisi sebagai pusat pelayanan pendidikan. Kabupaten Majene ingin memastikan bahwa peran dan kontribusinya tetap relevan bagi pembangunan provinsi. Hal tersebut mendorong Majene untuk menunjukkan bahwa meskipun tidak menjadi Ibukota, mereka tetap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang pendidikan. Dengan menjadi pusat pelayanan pendidikan, Majene dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia. Kabupaten Majene melihat pendidikan sebagai bidang yang dapat memberikan dampak jangka panjang. Dengan mengalihkan fokus dari harapan menjadi ibukota ke permintaan menjadi pusat pelayanan pendidikan.

Meskipun Majene gagal menjadi Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat, akan tetapi kabupaten ini pada hakekatnya justru memperoleh posisi dan peran yang lebih strategis. Seperti yang diketahui pendidikan merupakan kunci utama indikator kemajuan daerah, dimana Majene harus bisa memanfaatkan posisi tersebut sehingga mampu mencetak SDM berkualitas unggul. Selain itu, tuntutan Majene menjadi salah satu wilayah strategis pemerintahan di bidang pelayanan pendidikan tersebut telah disetujui kongres yang artinya kepentingan para aktor sudah terakomodir dengan baik

karena adanya kesepakatan bersama, di mana Mamuju memperoleh posisinya sebagai Ibu Kota provinsi dan Majene sebagai objek vital pusat pendidikannya.

Dinamika tarik ulur kepentingan antar aktor di tingkat daerah dalam memperoleh posisi strategis pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat yang mengarah pada keputusan jalan tengah yang dianggap paling objektif dan rasional. Tidak hanya itu, penerimaan Majene menjadi pusat pelayanan pendidikan bukan serta merta atas tuntutan dari Majene itu sendiri, namun ada dukungan dari beberapa tokoh Mandar seperti Prof. Basir Hasanuddin, Ma'mun Hasanuddin, Rahmat Hasanuddin yang notabenehnya merupakan pelopor pemekaran Sulawesi Barat.

Pada dasarnya penetapan Majene sebagai pusat pelayanan pendidikan bukan tanpa alasan, di mana dalam catatan sejarah pada masa kolonial Belanda sudah menjadikan Majene sebagai salah satu Afdeling di Sulawesi yang dikenal sebagai Afdeling Mandar. Dengan adanya jejak sejarah ini kemudian menjadi penanda bahwa, Kota Tua Majene sudah mengubah wajahnya menjadi sebuah kota modern di Tanah Mandar yang lebih cocok disandingkan sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan atau pendidikan. Majene memiliki sejarah panjang sebagai pusat pelayanan pendidikan di Sulawesi Barat. Sebagai salah satu kabupaten tertua di wilayah ini, Majene dikenal memiliki tradisi pendidikan yang kuat, yang telah berkembang sejak masa kolonial hingga masa Indonesia merdeka.

Sebagai Ibu Kota Afdeling Mandar, masyarakat Majene menjadi daerah yang paling pertama merasakan pendidikan modern. Saat itu fasilitas pendidikan yang modern di Majene menjadi awal melahirkan tokoh-tokoh nasional. Sejumlah tokoh nasional yang berpengaruh pernah merasakan pendidikan di Majene seperti Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, SH, ia pernah menjadi Bupati Majene dan Jaksa Agung RI pada era Presiden Gusdur. Selain itu, terdapat tokoh lain seperti Prof. Dr. Basri Hasanuddin pernah menjadi rektor Unhas dan Menko Kesra era Gusdur dan masih banyak lagi. Jika melihat tokoh-tokoh besar yang pernah berkiprah di tingkat nasional, tentu tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Tua Majene telah banyak melahirkan sumber daya manusia yang mumpuni sehingga sudah merubah wajahnya menjadi kota peradaban modern. Mayoritas peserta kongres menyetujui Kabupaten Majene ditetapkan sebagai pusat pelayanan pendidikan yang akan memiliki peran sentral dalam perkembangan Provinsi Sulawesi Barat melalui sektor pendidikan. Banyak faktor yang mendasari, terutama faktor yang berkaitan dengan pemerataan pembagian kekuasaan agar tidak terjadi kecemburuan yang berakibat konflik keberpanjangan antar kabupaten tergabung.

Melalui dukungan aktor yang berpengaruh ini, maka telah menghasilkan lobi politik yang cukup kuat dan menguntungkan bagi Kabupaten Majene. Sejalan dengan Teori Jaringan Aktor yang melihat bahwa pola objektif dapat menghubungkan anggota masyarakat baik dalam konteks individu maupun secara kelompok atau institusional, maka level struktur sosial skala luas baik pada struktur mikro dan makro yang dimiliki oleh aktor-aktor tersebut telah mampu mempengaruhi kebijakan publik ketika proses pemekaran terjadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alasan mengapa Kabupaten Majene menerima menjadi pusat pelayanan pendidikan di Sulawesi Barat ialah adanya keterlibatan aktor yang memiliki kekuatan (power) atau dukungan politik, legitimasi, informasi, dan partner koalisi sehingga mampu menghasilkan pertukaran (exchange) dan transaksi (transaction) sebagaimana pandangan Teori Jaringan Aktor. Hal inilah yang kemudian mengarah pada ditetapkannya Majene menjadi salah satu objek vital di Sulawesi Barat yakni sebagai Pusat Pelayanan Pendidikan dengan berbagai interaksi antar aktor di dalamnya.

## 2. Pola Interaksi dan Keputusan Final

Interaksi aktor merupakan aktivitas yang dapat menentukan arah dan hasil kebijakan publik, karena keterlibatan aktor mempunyai posisi yang sangat strategis dalam proses kebijakan. Aktor-aktor yang terlibat pada dasarnya menentukan pola dan distribusi kebijakan dalam proses interaksi dan interelasi cenderung bersifat konfliktif dibanding dengan sifat yang harmoni. Kebijakan penetapan Majene sebagai pusat pelayanan pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat sangat berkaitan dengan kekecewaan Majene setelah penetapan Mamuju sebagai Ibu Kota provinsi Sulawesi Barat.

Momentum Pemekaran Provinsi Sulawesi Barat dimanfaatkan oleh sebagian aktor baik dari institusi formal maupun informal untuk mengajukan kepentingannya.

Pada bagian ini mengkaji tentang interaksi aktor formal dan informal dalam penetapan kawasan pusat pelayanan pendidikan. Berdasarkan klasifikasi aktor formal terdiri dari Gubernur, Bupati Majene dan DPRD Kab. Majene. Sedangkan aktor informal pejuang pembentukan Sulawesi Barat yang tergabung dalam KAPP-Sulbar. Namun terdapat juga jaringan aktor lain selain aktor yang disebutkan diatas yaitu, tokoh nasional yang berasal dari Sulawesi Barat, mahasiswa dan masyarakat. Berdasarkan identifikasi aktor dalam proses penetapan kebijakan publik pusat pelayanan pendidikan di provinsi Sulawesi Barat, penulis mengklasifikasi ke dalam beberapa jenis interaksi antar aktor, 1) Interaksi formal dan informal; 2) Interaksi Eksekutif dan Legislatif.

#### a. **Interaksi Formal dan Informal**

Kelompok formal disini adalah pemerintah daerah Majene yakni Bupati dan DPRD Kabupaten Majene. HM. Tadjuddin Noer adalah salah satu aktor yang mendukung pemekaran dengan penuh semangat. HM. Tadjuddin merupakan Bupati Majene pada periode 1996-2001, sebagai Bupati Majene, HM. Tadjuddin Noer memiliki tanggung jawab dalam pemerintahan daerah dan berperan setiap kebijakan di wilayah tersebut. Pun memainkan peran kunci dalam mengorganisir dan mendukung berbagai inisiatif pembangunan daerah, termasuk pengembangan pendidikan.

Sedangkan M.Yunus Caco merupakan wakil Ketua DPRD Kabupaten Majene periode pada saat itu. Sebagai aktor legislatif M. Yunus Caco memiliki posisi strategis dalam mendukung kebijakan dan keputusan terkait pengembangan wilayah, berperan dalam memimpin dewan dan mengarahkan perhatian pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat Majene. Sejak adanya permintaan Kabupaten Mamuju yang menginginkan Ibukota Provinsi, M. Yunus Caco merupakan salah satu aktor yang menentang gagasan tersebut menekankan Majene pun juga layak menjadi Ibukota provinsi, penempatan Ibukota Provinsi harus kembali ke realitas sejarah. Kemudian berpendapat bahwa fokus pemekaran Provinsi Sulawesi Barat jauh lebih penting dari pada sekedar memperebutkan Ibukota Provinsi.

KAPP Sulbar dibentuk sebagai wadah perjuangan masyarakat Sulawesi Barat dalam pemekaran provinsi baru ini. KAPP Sulbar menjadi motor penggerak utama yang mengkoordinasikan berbagai aktivitas, mulai dari lobi politik, penggalangan dukungan dari tokoh masyarakat dan pemimpin daerah, hingga pengorganisasian aksi-aksi massa. KAPP-Sulbar di ketuai Oleh Rahmat Hasanuddin, kemudian dibantu oleh Ma'mun hasanuddin, Husni Hasanuddin dan pejuang lainnya. Posisi KAPP-Sulbar dalam pemekaran Sulawesi Barat sangat sentral, sebagai pelopor pembentukan Sulbar mempunyai kewenangan khusus dalam memutuskan setiap kebijakan yang dibuat.

Dalam berbagai kasus posisi aktor informal dalam penetapan kebijakan publik sifatnya abstrak atau tidak terlihat secara langsung. Namun pada kasus ini, aktor informal yakni KAPP-Sulbar memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh dalam setiap pembagian dan pemutusan kebijakan. Guna mempercepat pemekaran, KAPP-Sulbar membentuk suatu jaringan untuk membantu kinerja ke daerah kemudian membentuk KAPP-Sulbar Pokja Mamuju yang di ketuai oleh Archul Tahir, Majene di ketuai oleh H.M Djafar dan Polmas di ketuai oleh Syahrir Hamdani. Keterlibatan ketiga pokja tentunya diharapkan dapat membantu percepatan pemekaran Sulbar. Proses interaksi telah berlangsung pada masa pembentukan Sulawesi Barat, klimaknya pada saat Kongres Rakyat Mandar. Pada kongres tersebut memutuskan Mamuju sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat, meskipun sempat mendapat protes keras dari Majene dan Polmas. Tak mau kalah dari Mamuju akhirnya Majene dan Polmas meminta bagian yaitu Majene meminta sebagai pusat pelayanan pendidikan dan Polmas sebagai kepala pemerintahan (Gubernur).

Delegasi Majene melakukan diskusi internal berkisar pada apa yang dianggap sebagai ketidakadilan atau kurangnya pertimbangan atas potensi dan sejarah Majene. Interaksi tidak hanya berfokus pada langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa Majene tetap memiliki peran penting di Sulawesi Barat. Salah satu langkah tersebut adalah dengan memperjuangkan Majene sebagai pusat pelayanan pendidikan, sebuah strategi yang akhirnya muncul sebagai salah satu

usulan utama. Dengan demikian, meskipun gagal menjadi ibu kota, eksekutif dan legislatif bekerja sama untuk memperkuat posisi Majene sebagai pusat pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di provinsi baru ini.

Usulan ini tentu didorong oleh keyakinan bahwa pendidikan adalah salah satu sektor utama untuk memajukan daerah, dan menjadikan Majene sebagai pusat pendidikan akan memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan provinsi secara keseluruhan. Kolaborasi ini mencerminkan langkah-langkah yang diambil oleh para pemimpin daerah yang berfokus pada pembangunan jangka panjang dan bagaimana mengoptimalkan potensi lokal mereka meskipun tidak mendapatkan status administratif tertinggi di provinsi baru. Usulan tersebut tidak hanya dari Bupati dan DPRD Kabupaten Majene, namun datang dari aktor lokal lainnya seperti Kalma Katta selaku Ketua PUPR Kabupaten Majene.

Kemudian usulan tersebut diajukan kepada KAPP-Sulbar untuk ditindaklanjuti dan disepakati. Permintaan ini merupakan lobi politik untuk memperkuat posisi Majene dalam peta pengembangan Sulawesi Barat. Rahmat Hasanuddin sebagai ketua KAPP-Sulbar dalam kapasitasnya sebagai tokoh yang memiliki pengaruh dianggap sebagai sosok penting yang dapat mendukung langkah strategis ini. Dalam rangka menghindari perpecahan usulan dalam kongres tersebut disepakati Majene sebagai pusat pelayanan pendidikan dan seluruh Universitas negeri berada di kabupaten Majene dan Polmas sebagai kepala pemerintahan (Gubernur).

Interaksi ini mencerminkan dinamika politik lokal yang sering terjadi ketika wilayah dengan harapan besar untuk mendapatkan status administrasi atau politik tertinggi gagal mencapai tujuan tersebut, namun tetap berusaha mempertahankan pengaruh melalui jalur lain. Kerjasama antar internal pemerintah daerah Majene untuk meminta posisi Majene sebagai pusat pelayanan pendidikan kepada KAPP-Sulbar, mencerminkan upaya bersama dari tokoh-tokoh penting Majene untuk memperjuangkan peran strategis daerah mereka setelah gagal menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Mereka menyadari bahwa meskipun Majene gagal menjadi Ibukota, daerah ini masih memiliki potensi besar di bidang pendidikan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, interaksi yang terjadi antara lembaga instansi tersebut diklasifikasikan sebagai interaksi kerjasama (cooperation) koalisi. Sebagaimana proses kerjasama koalisi adalah usaha kombinasi bersama antar organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Bupati Majene, DPRD Kabupaten Majene, Dinas PUPR Kabupaten Majene saling bekerjasama untuk mendapatkan bagian dalam pemekaran Sulawesi Barat sebagai Pusat pelayanan pendidikan.

Demikian interaksi antara pemerintah daerah Majene dan KAPP-Sulbar dikategorikan kedalam interaksi tawar menawar (bargaining). Sebagaimana proses kerjasama tawar menawar (bargaining) adalah ketika dua pihak yang terlibat mendiskriminasikan transaksi seperti tawar menawar posisi (bargaining position) berusaha menegosiasikan hingga kedua belah pihak dapat saling menyetujui memiliki tujuan yang sama. Dalam posisi ini KAPP-Sulbar sebagai central dalam kongres tersebut juga memiliki kepentingan agar mendapatkan rekomendasi dari kabupaten tergabung harus menghimpun kepentingan dari pihak tergabung dengan posisi saling menguntungkan.

#### **b. Interaksi antara Eksekutif dan Legislatif**

Pada Interaksi ini terjadi antara pemerintah Kabupaten Majene dan Gubernur. Undang-undang No 32/2004 ditegaskan bahwa kedudukan Gubernur merupakan wakil pemerintah (pusat) yang memiliki peran sebagai koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks penetapan kebijakan publik, kedudukan aktor (jabatan) menjadi posisi sangat krusial. Pasca berdirinya Sulawesi Barat menjadi provinsi baru, diikuti dengan terpilihnya Gubernur defenitif pertama Provinsi Sulawesi Barat yakni Anwar Adnan Saleh. Pemerintah daerah Majene menindaklanjuti terkait posisi sebagai pusat pelayanan pendidikan. Hal tersebut dilakukan dikarenakan Mamuju masih menginginkan pusat pengembangan pendidikan. Beragam stigma dan pesimistis terkait kepantasan Majene sebagai pusat pelayanan pendidikan yang pada saat itu masih terbilang sangat rendah. Pembangunan Universitas negeri tidak mempunyai lahan yang cukup dan arah pendidikan belum jelas sebagai faktor Mamuju

ingin menarik posisi tersebut. Muhammad Darwis (Bupati) dan Kalma Katta (Wakil Bupati) mendesak anggota dewan perwakilan Majene di Provinsi menyusulkan dan menindaklanjuti agar surat keputusan segera dikeluarkan oleh Gubernur.

Proses interaksi antara pemerintah daerah Kabupaten Majene dan Gubernur dapat diklasifikasikan kedalam bentuk interaksi akomodasi koersif. Sebagaimana koersif adalah suatu bentuk akomodasi dimana terdapat salah satu pihak berada dalam kondisi yang lemah dibandingkan pihak yang lainnya. Dalam kasus penelitian ini sebagaimana dimaksudkan oleh soekanto, penulis memosisikan Majene sebagai pihak yang lemah. Dalam posisi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat, posisi Gubernur adalah hierarki jabatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan posisi-posisi yang lain dilingkungan birokrasi. Gubernur sebagai decision maker mengarahkan dan memimpin birokrasi-birokrasi di tingkat daerah.

Jika dilihat dari teori jaringan aktor Wellman, keputusan dan tindakan agen-agen individual dapat mempengaruhi efisiensi dan hasil dalam konteks jaringan yang kompleks. Aktor individual maupun kelompok dalam jaringan yang memiliki power akan cenderung lebih dominan dan mempunyai kemampuan mengambil keputusan. Terakomodasinya kepentingan dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya hubungan aktor terhadap pemegang kekuasaan yaitu pejuang pemekaran. Jika terdapat distribusi yang timpang, akan memotivasi aktor lain untuk bekerja sama memperoleh hal serupa.

Ditinjau dari Teori Jaringan Aktor dalam pandangan Roberts, pola interaksi antar aktor yang terjalin di atas tergolong kedalam empat tipologi strategi politik yang mengarah pada proses perumusan kebijakan dan keputusan final yang dicapai melalui posisi tawar menawar (bargaining position) yang kuat antar aktor terlibat. Roberts memandang penting untuk mengamati perilaku aktor yang berusaha untuk mempengaruhi proses perumusan kebijakan melalui strategi politik.

Dengan penerapan strategi politik melalui pola interaksi aktor tersebut di atas, maka empat tipologi dalam Teori Jaringan Aktor dalam pandangan Roberts telah terpenuhi dalam kasus ini, yaitu; 1). Adanya interaksi aktor dalam tawar-menawar dengan aktor lain dalam proses perumusan kebijakan untuk memperoleh posisi dan kepentingan mereka, di mana posisi ini mengacu kepada dukungan atau penentangan seseorang terhadap kebijakan yang diminati; 2). Strategi kekuasaan berusaha untuk mengubah kekuasaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dalam seorang aktor. Dalam kasus ini, adanya peran dari beberapa aktor yang berpengaruh seperti halnya Prof. Basir Hasanuddin, Ma'mun Hasanuddin dan Rahmat Hasanuddin telah mampu menjadi penengah atas konflik kepentingan antar aktor sehingga diperoleh kebijakan yang objektif dan proporsional sehingga mampu mengatasi tingkatan tipologi berikutnya, yakni 3). Memobilisasi aktor yang menjadi ancaman atau hambatan. Strategi ini dilakukan oleh aktor-aktor yang tidak berhasil terakomodasi kepentingannya dengan memainkan isu sebagai alat memobilisasi massa. Terakhir, 4) strategi persepsi yang berusaha mengubah cara berpikir dan cara aktor lain memetakan masalah dan solusi, dalam hal ini penetapan majene sebagai Pusat Pelayanan Pendidikan di Sulawesi Barat.

## SIMPULAN

Latar belakang Kabupaten Majene menerima menjadi pusat pelayanan pendidikan di Sulawesi Barat ialah adanya keterlibatan aktor yang memiliki kekuatan (power) atau dukungan politik, legitimasi, informasi, dan partner koalisi sehingga mampu menghasilkan pertukaran (exchange) dan transaksi (transaction). Selain itu faktor sejarah dan budaya Majene pada masa colonial Belanda sudah menjadi pusat administrasi dan pendidikan, kemudian di dukung oleh tokoh nasional mandar yang berkiprah di pusat. Terdapat tiga pola interaksi yang terjadi pada penetapan pusat pelayanan pendidikan di Majene yaitu, Interaksi yang terjadi antara pemerintah daerah Majene diklasifikasikan kedalam interaksi koalisi, kemudian di usulkan pada KAPP-Sulbar dikategorikan kedalam interaksi akomodasi koersif. Kemudian Proses interaksi antara pemerintah daerah Kabupaten Majene dan Gubernur definitive pertama Sulawesi Barat dapat diklasifikasikan kedalam bentuk interaksi akomodasi koersif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atherton & Klemmack, (2011) *Metode Penelitian Sosial Bandung*: PT Remaja Rosdakarya.
- Afriadi Fadli, dkk, (2021) *Interaksi Aktor Institusi Formal dan Informal (Studi Kasus: Tim 11 dalam Pemerintahan Kutai Kartanegara)*, Politik dan Governance 1.no.1.
- Budiardjo, Miriam. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia
- Burhan Bungin, (2007) *Penelitian Kualitatif Jakarta*: Kencana Group Beik,
- Deddy Mulyana, (2013) *Metode Penelitian Komunikasi Bandung*: PT Remaja Rosdakarya Hall,
- Fauzi, Achmad Nur. *Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Diponegoro Hall,
- Hamka, Muh (2022) "*Politik Anggaran: Relasi Aktor Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidrap Tahun 2022*", Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin) Sopia Rukmana,
- Irfan Syaui dan Arsyianti, Laily Dwi. (2016) *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: Rajawali Press
- Keller. (1984) *Penguasa dan Kelompok Elite*, (Jakarta: CV.Rajawali.
- Mas'asan, Yeby Mayruddin, dkk (2020) "*Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dan Informal dalam Kebijakan Publik dan Politik Keseharian*", Political Issue 2,no.1
- Mohtar, Mas'oed. (2003) *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moeljarto. (1984) *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Muhammad Idrus, (2009) *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Novayani (2020) "*Analisis Governance Network Dalam Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Bone*", Disertasi (Makassar: Universitas Hasanuddin)
- Parsons, Wayne. (Public Policy: *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- P. A., & Taylor, R. C. (1996). *Political science and the three new institutionalisms*. Political studies.
- Pambudi, Helmi Dwi Agung, et.al. (2021) *Pengaruh Politik Pembangunan terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol.1 No.2.
- Perda Kabupaten Majene No.2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. <https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 4 November 2022 pukul 13.57
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat 2014-2023*. <https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2022 pukul.12.0
- Putra, Fadilah dkk, (2019) *Analisis Kebijakan Publik Neoinstitusionalisme: Teori dan Praktek*. Bandung: LP3ES.
- Peters, B. G. (2011). *Institutional theory in political science: the new institutionalism*. Bloomsbury Publishing USA.
- Ratnasari, Puput. (2020) *Politik Pembangunan di Kota Palangka Raya Menuju Smart City Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: Jurnal Administrasi Publik. Vol.6.No.1

- Ramadhan, Moh. Fajar Shodiq. dan Tri Hendra Wahyudi. (2016). *Pembiaran Pada Potensi Konflik dan Kontestasi Semu Pemilukada Kota Blitar: Analisis Institusionalisme Pilihan Rasional*. Politik Pustaka Utama.
- Scout, Richard,(2008) *Institutions and organizations: Ideas an Interest* . Los Angeles, London, New Delhi, Singapore; Sage Publication. Third Edition
- Sjafrizal, (2014) *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonom*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Soerjono dan Abdurahman, (1991) *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, (2005) *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2016) *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* Cet. XXIV; Bandung: Alfabeta
- Soehartono, Irawan (2013) *Metode Penelitian Sosial* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Suzanne,
- Syadzily, Ace Hasan. (2014) *Desentralisasi, Otonomi, Dan Pemekaran Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Warjio. (2016) *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor dan Ideologi*, Jakarta:Kencana.
- Winarno, Budi (2014) *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, Jakarta: CAPS